

Kata Dede Yusuf, Pengangkatan Guru Honorer Jadi PNS Tanpa Tes Terganjak UU ASN



Realitarakyat.com – Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Himmatul Aliyah menyarankan agar guru honorer berusia di atas 35 tahun diangkat jadi PNS tanpa tes.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf sepakat dengan saran itu namun ada undang-undang yang mengatur soal ASN.

“Saya rasa kita semua meminta hal tersebut. Tapi memang ada UU ASN yang mewajibkan semua melewati tes,” kata Dede Yusuf kepada wartawan, Rabu (10/3/2021).

Dede Yusuf mengatakan pemerintah saat ini merujuk dengan undang-undang yang ada. “Dan pemerintah tunduk dengan UU,” ujarnya.

Dede Yusuf pun mengapresiasi upaya yang dilakukan Mendikbud Nadiem Makarim. Menurutnya, dalam kebijakan Nadiem sudah memberikan kesempatan bagi para guru honorer untuk dapat 3 kali mengulang proses seleksi PPPK, serta ada bonus penilaian bagi guru honorer yang sudah mengabdikan lebih dari 5 tahun.

“Itu sebabnya kita bisa menghargai upaya Mendikbud mencari solusi dengan berikan kesempatan bagi yang belum lulus bisa sampai 3 kali mengulang, dan mendapatkan bonus penilaian 15 persen bagi yang sudah mengabdikan lebih dari 5 tahun,” ujarnya.

Dede Yusuf menegaskan pemerintah tidak bisa melanggar undang-undang. Ia pun menilai kebijakan yang ada saat ini sudah kompromistis.

“Jadi pemerintah memang tidak bisa melanggar UU yang sudah dibuat juga. Ini adalah jalan kompromistis,” ucapnya.

Sebelumnya, Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Himmatul Aliyah, meminta pemerintah memperhatikan nasib para guru dan tenaga kependidikan (GTKA) honorer agar mendapatkan kehidupan yang lebih layak. Himmatul menyarankan agar guru honorer berusia di atas 35 tahun diangkat jadi PNS.

“Saya dari Fraksi Gerindra dalam RDPU mengusulkan agar GTK 35 ke atas dijadikan ASN tanpa tes karena mengingat pengalaman dan pengabdian selama jadi guru honorer,” kata Himmatul dalam rapat bersama Mendikbud, di Kompleks Parlemen, Rabu (10/3/2021).

Himmatul meminta pemerintah mempertimbangkan usulan tersebut. Dia mengatakan usulan itu kerap disampaikan, namun tidak ada tindak lanjutnya.

“Sebaiknya kasus GTK honorer ini diselesaikan dengan cara luar biasa, karena sudah terkatung lama yang seharusnya selesai tahun lalu,” ujarnya.[prs]